

POTRET PENDIDIKAN: ANTARA PENDIDIKAN, GLOBALISASI, DAN KAPITALISME

Faizal Alifiandi

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstract: *The world system, which is currently in the global-capitalist phase, makes everything change so quickly. This cannot be denied because of the rapid growth of world technology and information. The rapid change has entered the realm of education. The reality shows that education has now begun to lose its main function, which is to form a whole person / humanize humans. Education is still a fairly steep gap between the owners of capital and the marginalized. The views on certification and accreditation also need to be clarified that this is not a manifestation of what is learned from education. Certification and accreditation are only part of educational instruments that cannot be used as the main reference in assessing what is obtained after going through the education process. Furthermore, bank-style education must also be eliminated because it is the most obvious form of castration of humans' intellectual potential. Bank style education should be transformed into enlightening education, which is a practice where students are truly placed in the position of active subjects, not as passive objects that can be arbitrarily suppressed by their educators.*

Keywords: *education, globalization, and capitalism.*

Abstrak: Sistem dunia yang saat ini berada pada fase global-kapitalis membuat segalanya berubah dengan begitu cepat. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi dunia. Perubahan cepat tersebut telah masuk kedalam ranah pendidikan. Realita yang ada menunjukkan bahwa pendidikan saat ini sudah mulai kehilangan fungsi utamanya yaitu membentuk manusia yang seutuhnya/memanusiakan manusia. Pendidikan masih menjadi jurang pemisah yang cukup terjal antara kaum pemilik modal dan kaum marjinal. Pandangan mengenai sertifikasi dan akreditasi juga perlu untuk diluruskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bentuk manifestasi nyata dari apa yang dipetik dari yang namanya pendidikan. Sertifikasi dan akreditasi hanyalah bagian dari instrumen pendidikan yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama dalam menilai apa yang didapat setelah melalui proses pendidikan. Kemudian mengenai pendidikan gaya bank juga harus ditiadakan karena hal tersebut merupakan bentuk paling nyata atas pengebirian potensi intelektual yang dimiliki manusia. Pendidikan gaya bank seharusnya dirubah menjadi pendidikan yang mencerahkan, yaitu sebuah praktek dimana anak didik benar-benar ditempatkan pada posisi sebagai subjek aktif, bukan lagi sebagai objek pasif yang bisa semena-mena ditindas kecerdasannya oleh pendidik.

Katakunci: *pendidikan, globalisasi, dan kapitalisme.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara terminologis, pendidikan merupakan proses perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu ikhtiar manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat (Roqib, 2016). Pendidikan merupakan salah satu unsur vital yang ada dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi sumber sekaligus alat bagi manusia dalam mempelajari apa yang ada di seluruh jagad raya ini. Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai proses manusia dalam mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Maka dari itu, pendidikan pada hakikatnya adalah proses ikhtiar manusia untuk memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya tanpa ada yang berhak mengganggu proses tersebut sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang sebenar-benarnya dan bersifat universal untuk seluruh umat manusia.

Pendidikan yang bersifat universal tersebut seharusnya mampu dinikmati oleh seluruh umat manusia. Mampu menyentuh seluruh lapisan dan kasta sosial yang ada di masyarakat. Bukan hanya bagi mereka yang memiliki modal besar ataupun bagi mereka yang memiliki pangkat sosial tinggi yang dapat menikmati pendidikan. Pendidikan seharusnya hadir sebagai pencerah di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka semua bisa menikmati pendidikan tanpa mengalami kesulitan sama sekali. Akan tetapi, pada prakteknya, pendidikan seringkali masih melihat siapa yang lebih tinggi pangkatnya atau siapa yang lebih kapital (baca: modal). Siapa yang memiliki modal banyak, maka dia berhak menempati sekolah-sekolah dengan kualitas nomor satu, berhak mendapat buku pelajaran yang bagus, berhak mendapat ruang kelas yang memadai, dan juga berhak untuk menambah jam belajar mereka dengan pergi ke bimbel-bimbel ataupun dengan jalan les privat.

Ini semua tentu tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi dunia yang secara umum sedang berada dalam fase globalisasi ekonomi, yang berarti lanskap ekonomi dunia masih dalam fase ketergantungan terhadap pemilik modal (Faishal Aminudin, 2009). Fase tersebut membuat sistem pendidikan menjadi serba

kapitalis. Yang bermodal yang berkuasa, yaitu ketika siapa yang memiliki modal besar, uang banyak, maka dia yang mampu untuk mengenyam pendidikan dengan kualitas terbaik. Berbeda dengan mereka yang bermodal minim, tidak memiliki modal, maka mereka hanya akan mendapatkan pendidikan ala kadarnya, atau bahkan tidak mendapat pendidikan sama sekali.

Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan seperti yang termaktub dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat”. Jika sudah seperti ini, maka pendidikan sudah melenceng jauh dari tujuan awalnya, yaitu memanusiaikan manusia. Lalu nilai seperti apa yang harus ada dalam pendidikan dalam kondisi yang seperti ini?. Tentunya persoalan ini memerlukan kajian yang mendalam dan luas agar tercipta sistem pendidikan yang benar-benar memanusiaikan manusia, serta bersifat menyeluruh (dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat).

B. GLOBALISASI DAN KAPITALISME

Era globalisasi dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh adanya penyatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan lain sebagainya yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya, tanpa menghilangkan identitasnya masing-masing. Penyatuan ini terjadi berkat kemajuan teknologi informasi yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan setiap isu yang ada pada suatu negara dengan negara lain (Abuddin Nata, 2013). Penggabungan banyak sendi kehidupan diatas tentu menimbulkan banyak segi-segi yang berubah pada tiap sendinya. Ini sangat mungkin terjadi mengingat cepatnya arus pertukaran informasi baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Terutama pada media elektronik jenis sosial media seperti *Whatsapp, Line, Facebook, Instagram* dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh pesatnya perkembangan alat komunikasi terutama handphone. Terbukti dengan munculnya berbagai macam produk baru di tiap bulannya dengan berbagai macam varian menarik yang ditawarkan oleh para produsen handphone.

Namun sangat disayangkan dari sekian banyak produk yang dijajakan di pasaran, tidak ada satupun produk Indonesia yang ada di sana. Posisi Indonesia memang sudah berada didalam pusaran dan kontrol rezim ekonomi pasar. Ruang-ruang produksi yang seharusnya bisa dikontrol oleh negara sudah mulai beralih menjadi milik usaha-usaha privat (Faisham Aminudin, 2009). Imbasnya, masyarakat Indonesia memiliki daya konsumtif yang sangat tinggi terhadap teknologi. Masyarakat Indonesia belum bisa untuk menjadi produsen yang mandiri dalam membuat sebuah produk yang laku di pasaran. Masyarakat Indonesia belum mampu untuk menjadi *economic leader*, namun masyarakat Indonesia baru sekedar mampu untuk menjadi *follower* bagi kebijakan-kebijakan rezim pemegang kuasa ekonomi. Pola masyarakat seperti itulah yang kini berada di Indonesia.

Selain itu, dikarenakan maraknya usaha-usaha yang bersifat privat, maka hal tersebut juga menimbulkan sebuah sistem dimana siapa yang memiliki uang banyak maka dialah yang menang. Siapa yang paling kapital (baca: modal) maka dia yang berkuasa. Pastinya sistem seperti ini menggerus ekonomi rakyat yang berada di kalangan bawah. Mereka dituntut untuk memutar otak seratus kali lebih keras daripada kaum yang memiliki modal besar. Bila diantara mereka tidak mampu berpikir seratus kali lebih keras maka efeknya ialah makin banyak dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, mereka semakin menjadi golongan yang termarjinalkan. Tetapi makin marak juga kaum-kaum dengan pendapatan selangit. Sungguh ironi yang nyata.

1. Dampak Terhadap Pendidikan

Realita keadaan dunia yang semakin global-kapitalis ini tentu berimbas terhadap setiap sendi-sendi kehidupan, termasuk pendidikan. Ditengah tandusnya kondisi ekonomi rakyat yang membuat mereka semakin termarjinalkan, pendidikan seharusnya mampu hadir sebagai penyejuk atas rasa dahaga mereka terhadap ilmu. Akan tetapi, di tengah himpitan problematika ekonomi, pendidikan belum menunjukkan taringnya secara optimal sebagai *problem solver*, malah pendidikan menjadi bagian dari problematika bangsa (Wiwit Kurniawan, 2010). Memang mengesankan apa yang terjadi sekarang ini.

Bila kita mau untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai kondisi pendidikan “*zaman now*”, maka realita yang ada tidak hanya sekedar menyentil sisi kemanusiaan kita, tetapi juga menjadi tamparan keras. Bagaimana kita sering menjumpai banyak anak yang tidak sekolah, mereka lebih memilih untuk mengamen atau bekerja menjadi tukang sol sepatu daripada menjadi *good boy in the school*. Atau anak yang lebih memilih untuk putus sekolah dan berkeliaran di jalan raya daripada melanjutkan belajarnya.

Banyak fenomena dan tragedi yang mewarnai wajah pendidikan kita. Ada berita mengagetkan yang sempat menjadi sorotan publik, yaitu ketika seorang anak SD mencoba bunuh diri karena tidak dapat membayar uang iuran kegiatan ekstra pada gurunya (GATRA edisi 29). Serta di Gresik, bocah 13 tahun bunuh diri karena tidak mampu membayar SPP. Dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri (Jawa Pos, 15 Juli 2004). Alasannya klasik, mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk masuk ke sekolah. Mereka tidak cukup kapital untuk mengenyam bangku sekolah.

Dari realita diatas, pendidikan justru nampaknya masih menjadi jurang pemisah yang cukup terjal antara si miskin dan si kaya. Pendidikan menjadi phobia bagi kaum yang tidak memiliki modal. Hal ini sangat kontradiktif dengan pasal 5 ayat (1) UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Agaknya ada sesuatu yang perlu dibenahi disini. Antara peraturan yang tidak sampai kepada masyarakat dan tenaga pendidik, atau tenaga pendidik yang acuh tak acuh akan peraturan dan relia yang ada.

2. Sistem yang Sakit

Orang tua yang miskin, yang menginginkan anak mereka bersekolah, kurang peduli akan apa yang ingin anak-anak mereka pelajari. Mereka lebih peduli akan sertifikat dan uang yang akan mereka dapatkan setelah tamat sekolah. Dan orang tua dari kelas menengah menyerahkan anak mereka ke dalam asuhan guru supaya anaknya tidak sampai mempelajari apa yang dipelajari anak-anak miskin dijalanan (Ivan Illich, 2000). Masyarakat kini memandang apabila mereka telah selesai melakukan studi, maka mereka akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat tersebut mereka anggap sebagai alat utama mereka dalam mencari pekerjaan.

Mereka menganggap segala bentuk sertifikasi, standarisasi, dan akreditasi adalah hasil nyata dari apa yang selama ini mereka pelajari dari sebuah pendidikan. Ketiga hal di atas dijadikan target utama dalam pendidikan yang membuat sistem pendidikan menjadi sakit, melenceng dari tujuan awalnya, yaitu memanusiaikan manusia. Hal ini jelas tidak dapat terlepas dari sistem global-kapitalis yang menuntut mereka untuk mendapat sertifikasi dan pekerjaan secepatnya untuk mendapatkan pundi-pundi uang.

Dikarenakan lebih mengejar sertifikasi dan akreditasi, maka dalam kesehariannya pun aktivitas pendidikan berubah menjadi sebuah sistem yang bisa disebut sebagai “sistem pendidikan gaya bank”. Karakteristik narasi pendidikan seakan-akan sebuah tagihan utang. Kemerduan kata-kata guru tidak mengubah kekuatan mereka. Apa yang guru ajarkan hanya pada kisaran format: lima kali lima adalah dua puluh lima; ibu kota Indonesia adalah Jakarta; laut terdalam di Indonesia adalah laut Banda, dan sebagainya. Siswa hanya mencatat, menghafal, dan mengulangi ungkapan-ungkapan guru tanpa memahami apa esensi “lima”, apa esensi “ibu kota”, dan apa pula esensi “laut terdalam” (Sudarwan Danim, 2013).

Guru diibaratkan sebagai nasabah yang boleh kapan saja untuk mengisi apa saja kepada rekeningnya, boleh untuk mengisi apa saja kepada rekeningnya. Guru menyajikan materi, sedangkan siswa hanya sebagai subjek yang tidak berdaya. Guru di asumsikan sebagai orang yang paling tahu di dalam kelas dan tidak berhak untuk dikritik oleh para siswanya.

Sedangkan siswa sendiri diibaratkan sebagai sebuah rekening yang siap untuk diisi apa saja oleh guru tanpa berhak menolak apa yang guru sampaikan, dan juga nantinya guru berhak untuk memetik keuntungan dari siswa berupa bayaran berupa uang ataupun yang sejenisnya. Siswa hanya dipersilahkan untuk menyadap apa yang guru sampaikan sehingga membuat siswa menjadi objek pasif dan memenjarakan kreatifitas serta pemikiran mereka. Bisa dikatakan, praktek pendidikan seperti diatas merupakan sebuah praktek pengebirian terhadap potensi intelektual siswa.

C. KESIMPULAN

Sistem dunia yang saat ini berada pada fase global-kapitalis membuat segalanya berubah dengan begitu cepat. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena pesatnya pertumbuhan teknologi dan informasi dunia. Perubahan cepat tersebut telah masuk kedalam ranah pendidikan. Realita yang ada menunjukkan bahwa pendidikan saat ini sudah mulai kehilangan fungsi utamanya yaitu membentuk manusia yang seutuhnya/memanusiakan manusia. Pendidikan masih menjadi jurang pemisah yang cukup terjal antara kaum pemilik modal dan kaum marjinal. Pandangan mengenai sertifikasi dan akreditasi juga perlu untuk diluruskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bentuk manifestasi nyata dari apa yang dipetik dari yang namanya pendidikan. Sertifikasi dan akreditasi hanyalah bagian dari instrumen pendidikan yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama dalam menilai apa yang di dapat setelah melalui proses pendidikan. Kemudian mengenai pendidikan gaya bank juga harus ditiadakan karena hal tersebut merupakan bentuk paling nyata atas pengebirian potensi intelektual yang dimiliki manusia. Pendidikan gaya bank seharusnya diubah menjadi pendidikan yang mencerahkan, yaitu sebuah praktek dimana anak didik benar-benar ditempatkan pada posisi sebagai subjek aktif, bukan lagi sebagai obyek pasif yang bisa semena-mena ditindas kecerdasannya oleh pendidik.

Diperlukan adanya interkoneksi dan integrasi yang kuat antara pemerintah, pelaku pendidikan, dan masyarakat Indonesia agar benar-benar tercipta sebuah pendidikan yang ideal bagi masyarakat Indonesia di tengah zaman yang serba global-kapitalis. Saat ini, yang dibutuhkan bagi kemajuan dunia pendidikan adalah segera membuat dan mengambil kebijakan politik sebelum negara ini menjadi lebih “menyedihkan”. Upaya serempak dari para pemimpin dan rakyat akan menumbuhkan persatuan dan kekompakan sehingga akan lebih mudah dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abddin Nata. 2013. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Ivan Illich, *Deschooling Societ*, Terj. A. Sonny Keraf. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- M. Faishal Aminudin.dkk. 2009. *Globalisasi dan Neoliberalisme: Pagaruh dan Dampaknya bagi Demokratisasi Indonesia*. Surabaya-Malang: Logung Pustaka.
- Moh. Roqib. 2016. *Ilmu Pendidikan Islam*. Purwokerto: LkiS & An-Najah Press.
- Sudarwan Danim. 2013. *Pedagogi, Aandragogi, dan Heutagogi*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Wiwit Kurniawan. 2010. *Masih Relevankah Sekolah sebagai Penyelenggara Pendidikan?* Purwokerto: Penerbit Akarlangit.